

TINJAUAN HISTORIS TERHADAP BANGUNAN WATERTOREN PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI PALEMBANG TAHUN 1929- 1955

Imam Lazio Rianda, M. Yoga Pratama, Syarifuddin
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya
e-mail: imamlaziorianda@gmail.com
, pnctrn@gmail.com, syarifuddin@fkip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Kajian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang tinjauan historis terhadap bangunan *watertoren* peninggalan kolonial Belanda di Palembang tahun 1928-1955. Penulisan artikel ini dilatarbelakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui tinjauan historis gedung *watertoren*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pembangunan gedung *watertoren* dan transformasi fungsi gedung *watertoren* dari masa kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metodologi historis atau metode sejarah dan jenis penelitian kajian pustaka. Hasil penelitian ini (1) Latar belakang berdirinya bangunan *watertoren* yaitu untuk mengatasi permasalahan air bersih yang melanda pada saat itu di Palembang. (2) Transformasi fungsi bangunan *watertoren* pada masa kolonial Belanda berfungsi sebagai kantor *burgemeester* (walikota) dan penyalur utama air di Palembang. Sedangkan pada masa pendudukan jepang, bangunan *watertoren* berfungsi sebagai kantor *chokan* (kepala residen). Kemudian, pada masa revolusi fisik, bangunan ini berfungsi sebagai markas tentara Belanda. Lalu setelah itu, pada tahun 1955 bangunan *watertoren* difungsikan sebagai kantor walikota Palembang hingga saat ini.

Kata kunci: *Bangunan Kolonialisme, Watertoren, Palembang*

ABSTRACT

This study describes and analyzes the historical review of the Dutch colonial watertoren building in Palembang from 1928 to 1955. The writing of this article is motivated by the author's desire to understand the historical background of the watertoren building. The aim of this research is to explore the background of the construction of the watertoren and the transformation of its function from the Dutch colonial period to the post-independence era. This research uses a historical methodology and applies a literature review approach. The findings of this study are: (1) The construction of the watertoren was driven by the need to address the clean water crisis that occurred in Palembang at the time. (2) The functional transformation of the watertoren includes its use during the Dutch colonial period as the office of the burgemeester (mayor) and as the main water distribution center in Palembang. During the Japanese occupation, the building served as the office of the chokan (resident head). Later, during the physical revolution period, it functioned as a base for the Dutch military. Finally, in 1955, the watertoren was repurposed as the Palembang mayor's office, a function it continues to serve today.

Keywords: *Colonial Architecture, Watertoren, Palembang*

©Pendidikan Sejarah FKIP UM Palembang
DOI: <https://doi.org/10.32502/jdh.v5i1.9824>

PENDAHULUAN

Kota Palembang memasuki periode kolonialisme Hindia Belanda dari kurun waktu tahun 1825 hingga tahun 1942. Dalam kurun waktu tersebut Kota Palembang menjalankan beberapa sistem pemerintahan

yang saat itu diberlakukan. Bentuk pemerintahan di Palembang mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan Staatsblad 1925 no. 577 peraturan dan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Undang-undang

mengenai susunan sistem Pemerintah Hindia Belanda yaitu *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* yang disingkat *Indische Staatsregelling* dan lebih singkat lagi: I.S (Surianingrat, 1981).

Sistem pemerintahan yang berlaku di Palembang tidak terlepas dari pengaruh kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk tanah jajahannya. Penaklukan Palembang pada abad ke 19 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai upaya untuk melaksanakan tujuan agar terciptanya suatu tatanan pemerintahan di bawah bendera Hindia Belanda (*Pax Neerlandica*). Dalam mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan cara pasifikasi di nusantara. Banyak daerah-daerah yang dahulu berdaulat kemudian kehilangan kekuasaannya dan dijadikan bagian dari Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Palembang ditaklukan oleh Pemerintahan kolonial Hindia Belanda setelah Kesultanan Palembang Darusalam kalah perang melawan pasukan militer Belanda tahun 1821. Kemudian Palembang menjadi bagian dari Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda setelah Kesultanan Palembang Darusalam resmi dihapuskan pada tahun 1825. Hal ini merupakan bagian dari usaha Pemerintahan kolonial Hindia Belanda menaklukan daerah-daerah di nusantara dan menyatukannya dibawah bendera Hindia Belanda (Kartodirjo, 1987).

Setelah Kesultanan Palembang Darusalam resmi dihapuskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1825, sehingga sistem pemerintahan yang berlaku yaitu sistem pemerintahan tidak langsung. Bentuk pemerintahan ini masih melibatkan pribumi dalam struktur pemerintahannya. Palembang kemudian dijadikan sebagai daerah keresidenan dengan seorang residen dan asisten residen. Sistem pemerintahan tidak langsung bertahan hingga tahun 1850 setelah terjadinya berbagai pemberontakan di daerah pedalaman karena pemerintah Belanda di Palembang dianggap lemah. Setelah masa pemerintahan tidak langsung berakhir, Belanda menjalankan

pemerintahan sendiri di Palembang tanpa melibatkan pribumi (Utomo, *et.al*, 2012). Pemerintahan dilaksanakan secara langsung dan kekuasaan dipegang oleh residen sepenuhnya.

Tahun 1903 undang-undang Desentralisasi ditetapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, ketetapan tersebut merupakan undang-undang otonomi (Basundoro, 2012). Sebagai implementasinya, pada tahun 1906 Palembang ditetapkan menjadi wilayah *Gemeente* atau kota besar. Berdasarkan aturan dan ketetapan tersebut menyebabkan Palembang berubah bentuknya menjadi wilayah *gemeente* yang dipimpin oleh seorang walikota (*burgemeester*) yang merupakan orang Belanda. Status *gemeente* menyebabkan Palembang menjalankan pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pemerintah Gubernur Jenderal di Batavia, hanya saja pemerintah *Gemeente* Palembang tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat di Batavia (Langgeng, *et.al*, 1998). Selain sebagai walikota, *burgemeester* juga menjabat sebagai ketua dewan kota yang dipilih oleh anggota dewan kota. Keanggotaan dewan kota terdiri dari orang Eropa, orang Timur Asing dan Pribumi yang dipilih oleh warga kota. Susunan keanggotaan dewan kota ini terus mengalami perubahan sampai *Gemeente* Palembang berakhir (Zubir, *et.al*, 2012),

Sejak Palembang ditetapkan menjadi *gemeente* pemerintah memiliki kesempatan untuk mengembangkan Palembang menjadi daerah yang lebih teratur dari periode sebelumnya. Pada awalnya *Gemeente* Palembang belum memiliki seorang walikota (*burgemesster*) yang menyebabkan belum adanya pembangunan yang menjadi perhatian. Setelah memiliki walikota, pemerintah *Gemeente* Palembang baru melakukan pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang meliputi sistem hukum, pendidikan, pertanian, dan berbagai infrastruktur (Akib, 1956). Salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan *Gemeente* Palembang pada saat itu adalah *watertoren* yang

dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan *Burgemeester* Nessel Van Lisa dalam mengatasi permasalahan air bersih yang terjadi pada saat itu. Selain berfungsi sebagai tempat penyaluran air bersih di Kota Palembang, bangunan ini juga dimanfaatkan sekaligus sebagai kantor *gemeente* dan *gemeenterads* (Hanafiah, 1988).

Sebagai bangunan tinggalan sejarah, gedung ini merupakan benda cagar budaya yang berasal dari masa kolonialisme Belanda yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Bangunan ini adalah satu dari sekian banyak tinggalan sejarah pada masa Kolonial Belanda yang menjadi saksi bisu bahwa Kota Palembang pernah menjadi tanah jajahan Belanda. Tentu saja bangunan tinggalan ini memiliki peran dalam terbentuknya sejarah Palembang, Sumatera Selatan.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah: (1) Bagaimana latar belakang pembangunan *watertoren* yang ada di Kota Palembang? (2) Apa fungsi bangunan *watertoren* yang ada di kota Palembang?.

Penulisan artikel dengan tema yang sama pernah dilakukan oleh Wahyu Hidayat dkk yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai Dari Historis dan Estetika Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berhasil meninjau bangunan bersejarah di Kota Medan melalui tinjauan historis dan estetika yang dijabarkan dengan sangat baik mulai dari latar belakang pembangunan bangunan tersebut dan fungsi serta dinamika penggunaan bangunan tersebut hingga penelitian tersebut selesai dilaksanakan.

Selain itu, Lalu Mulyadi dan Gaguk Sukiwoyono melalui penelitian yang berjudul Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang Sebagai Pusaka Kota (*Urban Heritage*) Pendekatan Persepsi Masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bangunan bersejarah di kota Malang dapat ditetapkan sebagai pusaka kota (*urban heritage*). Aditya W. Fitrianto juga pernah melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Historis Mengenai Arsitektur Tembok Batavia. Penelitian tersebut berhasil

Imam Lazio , Tinjau Historis Tentang...

mengkaji bangunan tembok batavia dari sudut pandang revitalisasinya.

Apabila menelaah penelitian terdahulu di atas, penelitian yang sedang penulis kaji memiliki perbedaan yang spesifik diantara ketiga penelitian terdahulu yang telah penulis jabarkan di atas. Adapun penelitian ini berfokus pada eksistensi bangunan *watertoren* peninggalan kolonial Belanda di Palembang yang sampai saat ini masih difungsikan. Penelitian ini akan meninjau secara historis perubahan fungsi yang terjadi pada bangunan *watertoren* mulai dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga digunakan sebagai kantor walikota Palembang.

Tinjauan historis terhadap bangunan *watertoren* peninggalan kolonial Belanda di Palembang tahun 1929-1955 ditujukan agar dapat menjelaskan perubahan fungsi bangunan menara air secara ilmiah dalam kajian sejarah. Tahun 1929 dipilih karena tahun tersebut merupakan tahun dibangunnya bangunan *watertoren*. Sedangkan, 1955 dipilih karena tahun tersebut merupakan tahun terakhir bangunan *watertoren* beralih fungsi menjadi kantor walikota Palembang.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, peneliti menggunakan metode historis atau sejarah. Kuntowijoyo (2013) mengemukakan terdapat lima tahap dalam metode historis, meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Pemilihan topik dilakukan berdasarkan tersedianya sumber primer dan sekunder secara memadai. Sumber primer yang digunakan meliputi koran-koran pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan buku-buku karya sejarawan terkemuka yang terbit pada masa awal kemerdekaan. Sumber sekunder yang digunakan meliputi tulisan artikel dan buku-buku yang mendukung informasi mengenai bangunan *watertoren*. Buku-buku yang mendukung di antaranya adalah buku Palembang Zaman Bari, Venesia dari Timur, buku-buku terbitan dari pemerintah kota Palembang, dan buku-

buku karya sejarawan Palembang seperti Djohan Hanafiah dan Bambang Budi Utomo.

Penulisan juga didukung oleh pendekatan-pendekatan ilmu sosial guna mempermudah pengambilan data. Pada kajian ini penulis menggunakan pendekatan geografi, sosiologi, dan politik. Pendekatan geografi akan menjelaskan alasan pemilihan lokasi pembangunan *watertoren* di kota Palembang. Pendekatan sosiologi akan menjelaskan dampak bangunan *watertoren* terhadap masyarakat sekitar. Sedangkan, pendekatan politik akan menjelaskan fungsi bangunan ini sebagai gedung pemerintahan. Penulis juga menggunakan Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data penulis berupa kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Kota Palembang Pada Masa *Gemeente* Palembang

Palembang mendapatkan status *gemeente* pada tanggal 1 april 1906 melalui *Staatblad* tahun 1906 no. 126. Status sebagai daerah *gemeente* menyebabkan Palembang mengalami transformasi yang cukup signifikan. Transformasi ini mengalami puncaknya ketika Palembang ditetapkan menjadi suatu kota otonomi berdasarkan undang-undang desentralisasi (Sujiyanti & Ali, 2015). Di bawah ini merupakan lambang *Gemeente* Palembang.



Gambar 1: Lambang *Gemeente* Palembang
Sumber: universiteitleiden.nl

Otonomi yang dilimpahkan oleh pemerintah Kolonial Belanda kepada daerah bawahannya tidak terlepas dari

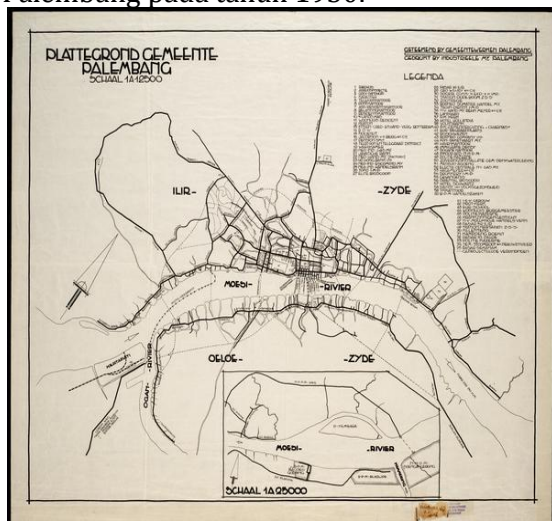
kepentingan-kepentingan ideologis, politik, ekonomis, dari birokratis. Segala perkembangan dan perubahan diberlakukan sesuai pula dengan kepentingan negeri Belanda. Penetapan Palembang sebagai daerah yang diberi otoritas untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan *Staatblad* tahun 1906 no 126 dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Di Palembang pada awal abad XX jumlah orang Belanda dan Eropa cukup banyak dan tingkat perkembangan penduduknya cukup tinggi. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah *gemeente* merupakan daerah yang dianggap sebagai kota yang harus memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dan mengembangkan daerahnya (Langgeng., *et.al*, 1998).

Pada awalnya selama tiga belas tahun setelah ditetapkan sebagai *gemeente*, Palembang belum memiliki seorang *burgemeester* (walikota). Selama kurun waktu tersebut, Palembang dipimpin oleh seorang *kontroleur* (Asisten Residen). *Burgemeester* (walikota) baru ada pada tahun 1919 dengan walikota pertama yaitu J.G. Larive yang dilantik menjadi *burgemeester* pada tanggal 25 Mei 1919 (Zed, 2003).

Sejak Palembang ditetapkan menjadi wilayah *gemeente*, pemerintah memiliki kesempatan untuk mengembangkan Palembang menjadi daerah yang lebih teratur dari periode sebelumnya. Pada awalnya belum adanya pembangunan yang menjadi perhatian. Dalam pelaksanaannya, Palembang baru menjalankan kebijakan pembangunan setelah tiga belas tahun ditetapkan menjadi wilayah *gemeente*. Hal ini dikarenakan di kota Palembang dalam kurun waktu tersebut terjadi kekosongan kepemimpinan, *burgemeester*, wali kota (Irwanto, 2011). Ketika telah memilih walikota, pembaharuan dan pembangunan berbagai bidang di kota Palembang baru dilakukan. Bidang-bidang yang diperbaharui diantaranya: sistem hukum, pendidikan, pertanian, dan berbagai infrastruktur. Kemudian pembangunan yang dilakukan diantaranya sarana pemerintahan,

kesehatan, transportasi, pasar dan lain-lain. Berbagai infrastruktur yang dibangun pada kurun waktu ini ditujukan agar bisa memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah Belanda dalam memperlancar pemerintahannya di Palembang (Akib, 1956).

Perwujudan kemajuan dan modernitas kota juga ditunjukkan oleh perkembangan infrastruktur, seperti jalan, rel, pelabuhan, dan bangunan (Samidi, 2017). Pada mulanya *Gemeente* Palembang belum memiliki rancangan kota yang matang. Tahun 1929, seorang Ahli *planologi* dari Surabaya bernama Ir. Thomas Karsten diperintahkan oleh Burgemeester van Lissa untuk membuat *stadsplan* atau rencana pembangunan Kota Palembang. Karsten sadar untuk memperbaiki Kota Palembang dibutuhkan rancangan yang matang (Utomo., *et.al*, 2012). Berikut merupakan peta *Gemeente* Palembang pada tahun 1930.



Gambar 2: Peta *Gemeente* Palembang, 1930
Sumber: universiteitleiden.nl

Stadsplan yang telah dirancang oleh Ir. Karsten diimplementasikan dengan cara membagi kota menjadi empat zona meliputi: (1) zona perniagaan sepanjang aliran Sungai Musi seberang Ilir mulai dari Sungai Rendang sampai Sungai Sekanak, (2) zona industri, *industrial estate* memanjang sepanjang Sungai Musi Seberang Ulu, (3) zona perkantoran terletak di kantor *gemeente* yang berfungsi juga sebagai menara air, (4) zona pemukiman dibangun di sebelah barat

Imam Lazio , Tinjau Historis Tentang...

pusat kota sebuah *real estate* di daerah Talang Semut (Irwanto., *et.al*, 2010).

Dalam kurun waktu 1906-1942, pemerintah *gemeente* melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pembangunan seperti pembangunan infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah *gemeente* adalah menara air atau *watertoren* yang dibangun guna mengatasi permasalahan air bersih yang terjadi di Palembang pada saat itu.

Pembangunan *Watertoren*

Palembang merupakan sebuah wilayah yang dialiri banyak aliran sungai dengan kondisi tanah yang sebagian besar terdapat rawa yang menyebabkan Palembang menjadi daerah yang basah. Kondisi tersebut tidak menjamin ketersediaan air bersih di Palembang. Sebaliknya, penduduk kota selalu menghadapi masalah krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhannya. Penggalan sumur sebagai sumber air bersih tidak dapat dilaksanakan karena keadaan tanah yang basah. Kondisi ini mengharuskan masyarakat menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga, saat musim kemarau sungai menjadi tercemar dan menimbulkan banyak penyakit seperti disentri yang menjadi penyakit rakyat dan berjangkit secara endemis (Utomo., *et.al*, 2012).

Dalam menanggulangi krisis air bersih, upaya yang dilakukan pemerintah *gemeente* yaitu melalui pembangunan *watertoren* atau menara air. Pembangunan *watertoren* sudah lama direncanakan, namun belum dapat terlaksana (Algemeen Handelsblad, 26 Februari 1929). Pembangunan baru dilaksanakan pada tahun 1929 yang dirancang oleh Ir. S. Snuijf dari Surabaya (Hanafiah, 1998). Awalnya *watertoren* dibangun hanya untuk digunakan sebagai penyalur air bersih di Kota Palembang. Namun dalam rapat *gemeenterads* yang dihadiri oleh Ir. S. Snuijf, memutuskan untuk membangun sayap samping dengan satu lantai di *watertoren* yang akan difungsikan

sebagai balaikota (De Sumatera Post, 27 Agustus 1929). Keputusan ini dibuat sesuai dengan proyek yang diajukan oleh Ir. Snuijf (De Locomotief, 27 Agustus 1929). Berikut merupakan potret gedung *watertoren* pada saat proses pembangunan.



Gambar 3: Proses Pembangunan *Watertoren* 1929-1931

Sumber:

palembangdalamsketsa.blogspot.com

Bangunan *watertoren* rampung pada tahun 1931 dan resmi dibuka pada tahun yang sama. Pembangunan *watertoren* memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, karena masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan berbagai penyakit akibat meminum air sumur dan air sungai yang tidak bersih (De Sumatera Post, 21 Agustus 1931).

Watertoren dibangun dengan luas 250 m², tinggi 35 meter dan dapat menampung 1200 meter kubik air. Pembangunan *watertoren* ini menghabiskan dana sebesar f. 1.550.000 yang setara dengan berat 1 ton emas. Sumber dana didapat dari dana pinjaman dengan bunga sebesar 5,5 % yang diangsur selama 29 tahun (Akib, 1956).

Konstruksi arsitektural bangunan *watertoren* bergaya *Art Deco*. Pada bagian eksterior, Snuijf menggunakan bentuk kotak

dan garis-garis vertikal pada kolom penyangga tandon air. Pada bagian interior banyak digunakan elemen dekorasi pada kepala kolom dan *railing* tangga dengan material industrial seperti beton bertulang dan besi baja. Dengan gaya bangunan *Art Deco* dan material industrial serta konstruksi bangunan tinggi itu ingin ditunjukkan bahwa Palembang serupa dengan kota lainnya di Hindia Belanda atau dunia secara umum (Abubakar., *et.al*, 2020).

Pembangunan *watertoren* rampung pada tahun 1931. Kemudian, air bersih didistribusikan kepada warga di sekitar daerah 16 Ilir, Segaran, dan daerah Talang Semut (pemukiman orang-orang Eropa) melalui *waterleiding*. Di daerah Talang Semut disediakan *hydrant-hydrant* dan sumur-sumur bor. Masyarakat dapat memperoleh air bersih dengan membeli seharga satu sen untuk satu kaleng (Sujiyanti & Ali, 2015).

Transformasi Fungsi Bangunan *Watertoren*

Tabel 1: Perubahan Fungsi Gedung *Watertoren*

Masa		Fungsi
Tahun	Penduduk an	
1931-1942	Belanda	1. Berfungsi sebagai tempat penyaluran air bersih ke seluruh penjuru warga kota 2. Kantor <i>burgemeester</i> (walikota) dan <i>gemeenterads</i> (Dewan Kota)
1942-1945	Jepang	Kantor <i>Chokan</i>
1945-1955	Revolusi Fisik	Markas tentara Belanda

1955 - Sekarang	Kemerdekaan	Kantor Walikota Palembang
--------------------	-------------	------------------------------

Sumber: Irwanto, 2011

Dalam perkembangannya, bangunan *watertoren* mengalami perubahan fungsi. Pada masa pendudukan Belanda, bangunan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu sebagai kantor *burgermeester* (walikota) *Gemeente Palembang* yang terletak pada bagian lantai bawah gedung, lalu yang kedua berfungsi sebagai sentral saluran air untuk keperluan penjurusan masyarakat kota. (Utomo, *et.al*, 2012). Berikut adalah potret gedung *watertoren* pada masa pendudukan Belanda tahun 1935.



Gambar 4: Gedung *Watertoren*, 1935
Sumber: universiteitleiden.nl

Pasca kolonial Belanda, kekuasaan diambil alih militer Jepang. Gedung *watertoren* masih dalam fungsinya mengatur pemerintahan yakni sebagai kantor *chokan* atau residen yang mengurus Keresidenan Palembang, sedangkan balai kota dipindahkan pemerintahan militer Jepang ke bekas kantor residen. Pada zaman Jepang ini, fungsi gedung *watertoren* sebagai menara air sebagai penyalur air bersih untuk warga mengalami masalah pelik. Perbedaan antara kedua bangsa asing di Palembang terhadap gedung *watertoren* ini adalah pada aliran atau pipa penyalur air tersebut. Pada masa Kolonial Belanda, menara air tersebut langsung dialiri oleh pipa khusus dari penyaluran 3 ilir tanpa ada proses penyedotan air di tengah jalan, sedangkan zaman militer Jepang pipa khusus tersebut

Imam Lazio , *Tinjau Historis Tentang...*

dialihfungsikan sebagai pipa biasa sehingga air tidak akan sampai di menara karena adanya proses penyedotan air tersebut. (Irwanto, 2011).

Selanjutnya pada masa revolusi fisik, gedung *watertoren* dijadikan markas militer Belanda, sementara itu balai kota diungsikan ke ELS atau sekolah rendah Belanda yang tertelak di depan Jalan Tengkuruk. Gedung sekolah tersebut digunakan hingga 1955, akan tetapi sebagai kantor walikota terbilang masih terlalu kecil dan jauh dari wajar untuk balaikota. Berikut adalah potret gedung *watertoren* pada tahun 1950.



Gambar 5: *Watertoren*, 1950
Sumbet: tropenmuseum.nl

Rezim Ali Amin sebagai walikota berinisiatif untuk mengembalikan *status quo watertoren* sebagai balai kota. Namun inisiatif tersebut bukanlah hal yang mudah. Pasca pengakuan kedaulatan dari Belanda, ruang atau bilik di dalam gedung tersebut dialokasikan oleh berbagai instansi pemerintahan lainnya. Ali Amin pun menyiasati penyerahan ruang-ruang tersebut dengan membuat rencana "kejutan" ketika perayaan Ulang Tahun ke-50 Kotapraja Palembang (1906-1956). Skenario tersebut dimana Ali Amin berpura-pura membatalkan acara perayaan tersebut, apabila ingin diselenggarakan maka fungsi *watertoren*

harus dikembalikan seperti zaman kolonial yaitu sebagai kantor walikota. Ancaman dari skenario ini ternyata berhasil, para kepala instansi di gedung tersebut dengan sukarela dan sudi mengembalikan ruang atau bilik gedung tersebut sebagai kantor walikota (Irwanto, 2011). Berikut merupakan potret gedung *watertoren* pada saat menjadi kantor walikota Palembang saat ini.



Gambar 6: *Watertoren* saat ini
Sumber: dokumentasi pribadi

Gedung *watertoren* menjadi bukti nyata bahwa modernisasi kolonialisme di Palembang. Menara ini pun pernah menjadi rambu-rambu peringatan dalam tiap peperangan di Palembang dari zaman pendudukan *Nippon Asia*, perjuangan masyarakat sipil Palembang masa revolusi fisik. Rambu-rambu tersebut menjadi tanda bagi masyarakat lokal bahwa akan terjadinya pertempuran dan sudah berjalan dalam masa-masa tersebut. Semenjak kembalinya pemerintahan sipil secara penuh di Palembang pada tahun 1955, gedung *watertoren* difungsikan sebagai kantor Walikota dan menjadi pusat pemerintahan Palembang. (Irwanto, 2011).

KESIMPULAN

Kota Palembang mulai memasuki periode kolonialisme Hindia Belanda dimulai pada tahun 1825 yang ditandai dengan penghapusan secara resmi Kesultanan Palembang Darusalam oleh pemerintah kolonial Hindia. Pada tahun 1906 Palembang ditetapkan menjadi wilayah *Gemeente* atau kota besar. Dampak dari *gemeente* ini adalah pemerintah memiliki wewenang untuk mengembangkan Palembang menjadi daerah yang lebih teratur dari periode sebelumnya.

Dalam kurun waktu 1906-1942, pemerintah *gemeente* melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam bidang pembangunan seperti pembangunan infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah *gemeente* adalah *watertoren* atau menara air yang dibangun guna mengatasi permasalahan air bersih yang terjadi di Palembang pada saat itu.

Dalam menanggulangi krisis air bersih, upaya yang dilaksanakan pemerintah *gemeente* yaitu melalui pembangunan *watertoren* atau menara air di atas kantor *gemeente* Palembang. *Watertoren* dibangun dengan luas 250 m², tinggi 35 meter dan dapat menampung 1200 meter kubik air. Dengan konstruksi arsitektural bangunan *watertoren* bergaya *Art Deco*.

Dalam perkembangannya, bangunan *watertoren* mengalami beberapa kali perubahan fungsi. Dimulai dari awal dibangunnya tahun 1929 pada masa pemerintah kolonial Belanda yang difungsikan sebagai menara air pada lantai atas dan gedung perkantoran pada lantai bawah. Pada masa Palembang masih diduduki oleh pemerintahan Jepang, gedung *watertoren* digunakan sebagai kantor residen (*chokan*). Pada masa revolusi fisik digunakan sebagai markas tentara Belanda. Kemudian dari tahun 1955 sampai sekarang gedung *watertoren* difungsikan sebagai gedung pemerintah kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Algemeen Handelsblad*, 26 Februari 1929.
De Locomotief, 27 Agustus 1929, Nomor 197.
De Sumatera Post, 27 Agustus 1929.
De Sumatera Post, 21 Agustus 1931

Artikel Jurnal

- Fitrianto, A.W. (2016). Tinjauan Historis Mengenai Arsitektur Tembok Batavia. *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, 9 (2), 39-47.
- Hidayat, W., et.al. (2018) Kajian Bangunan Bersejarah Dinilai Dari Historis dan Estetika Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. *Saintek ITM*, Vol 31, No 2.
- Samidi. (2017). Surabaya sebagai Kota Kolonial Modern pada Akhir Abad ke-19: Industri, Transportasi, Permukiman, dan Kemajemukan Masyarakat. *Mozaik Humaniora*, Vol. 17 (1): 157 - 180.
- Sujiyanti & Ali. (2015). Pembangunan Kota Palembang dengan Konsep Tata Ruang Kota Hijau Pada Masa Hindia Belanda. *Jurnal Tamaddun*, 15 (1).

Prosiding

- Mulyadi, L., & Sukiwiyono, G. (2014). Kajian Bangunan Bersejarah di Kota Malang Sebagai Pusaka Kota (*Urban Heritage*) Pendekatan Persepsi Masyarakat. *Prosiding Temu Ilmiah IPLBI*.

Buku

- Abubakar., et.al. (2020). *Oedjan Mas di Bumi Sriwijaya Bank Indonesia dan Heritage di Sumatera Selatan*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Akib, R. (1956). *Kota Palembang 1272 Tahun (684-1956) dan 50 Tahun Kotapradja (haminte) Palembang 1906-1956*. Palembang: Rama Publishing House.
- Basundoro, P. (2012). *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.
- Hanafiah, D. (1988). *Palembang Zaman Bari: Citra Palembang Tempo Doeloe*. Palembang: Humas Pemerintah Kotamadya Palembang.
- Hanafiah, D. (1998). *Masjid Agung Palembang: Sejarah dan Masa Depannya*. Jakarta: C.V. Masagung.

Imam Lazio , Tinjau Historis Tentang...

- Irwanto, D. (2011). *Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pasca Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Irwanto., et.al. (2010). *Iliran dan Uluan Dikotomi dan Dinamika dalam Sejarah Cultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher.
- Kartodirjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium jilid I*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Langgeng., et.al. (1998). *Otonomi Daerah di Hindia Belanda 1903-1920*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Surianingrat, B. (1981). *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta: Dewaruri Press.
- Utomo., et.al. (2012). *Kota Palembang Wanua Sriwijaya menuju Palembang Modern*. Palembang: Pemerintah Kota Palembang.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Zubir., et.al. (2012). *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Selatan: Sumatera Selatan dalam Kajian Sosial dan Ekonomi*. Padang: BSNT Padang Press.